

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan adalah proses administratif yang bersifat umum dan dapat dianalisis pada tingkat program tertentu. Proses ini akan dimulai setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, program kegiatan disusun, serta dana disiapkan dan dialokasikan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Implementasi kebijakan berfungsi sebagai penghubung antara tujuan kebijakan dan realisasinya, serta hasil dari kegiatan pemerintah. Sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (Grindle, 1980: 6) tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak berkepentingan. Setiap kebijakan yang dirumuskan harus diimplementasikan, sehingga implementasi kebijakan menjadi suatu keharusan karena berbagai alasan dan perspektif. Tanpa adanya implementasi yang efektif, keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik (Akib, 2010).

Masalah lingkungan hidup merupakan sebuah kondisi aktual secara global tentang terjadinya kerusakan ataupun pencemaran lingkungan akibat dari adanya beragam aktivitas manusia. Peristiwa ini ditandai dengan peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK). Akibat yang ditimbulkan, terjadinya peningkatan radiasi sinar matahari yang terperangkap di atmosfer sehingga berdampak pada kenaikan suhu bumi yang dikenal sebagai pemanasan global. Laporan Perubahan Iklim yang disusun oleh *Copernicus Climate Change Service (C3S)* melansir bahwa tahun 2023 menjadi tahun 'terpanas'. Pada tahun tersebut, suhu rata-rata global naik hingga 1,48 °C mendekati ambang batas kenaikan suhu 1,5°C yang disepakati dalam perjanjian Paris. Laporan tersebut menuliskan rata-rata suhu global pada tahun 1850-2020 berada dalam suhu terpanas dan menandakan bahwa perlunya tindakan masyarakat dunia untuk mengantisipasi perkiraan kenaikan suhu udara yang mengakibatkan pemanasan global (Pristiandaru, 2024).

Pada tingkat global, penanganan perubahan iklim menjadi salah satu tujuan utama dalam komitmen *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dideklarasikan oleh negara-negara melalui Sidang Umum PBB. Salah satu target dalam SDGs adalah menjaga kenaikan suhu di bawah 2°C. Indonesia telah menyetujui dan berkomitmen untuk mengendalikan perubahan iklim dengan

mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai yang tercantum dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC). Dalam Diskusi Pojok Iklim bertema "Ketahanan Iklim, SDGs, dan NDC" yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Novia Widyaningtyas, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), menekankan bahwa untuk mencapai target NDC, Indonesia perlu menggerakkan langkah strategis dengan melibatkan partisipasi masyarakat di tingkat lokal.

Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap perubahan iklim melalui berbagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatifnya terhadap lingkungan hidup. Pengendalian perubahan iklim dilakukan melalui kegiatan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Upaya mitigasi dan adaptasi, atau kombinasi keduanya, sangat penting dimulai dari tingkat desa, karena mayoritas masyarakat desa bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi perubahan iklim. Upaya mengatasi perubahan iklim di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Salah satu program nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam upaya lokal melawan perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (ProKlim). Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim melalui pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup. Pada acara pembukaan *Climate Action Summit* (CAS) pada 25 Januari 2021, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menegaskan komitmen pemerintah untuk melibatkan seluruh potensi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.

Melalui pernyataannya, ia menyampaikan bahwa Indonesia mendorong partisipasi masyarakat dalam mengurangi, beradaptasi, dan memitigasi dampak perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim, yang direncanakan mencakup 20.000 desa pada tahun 2024 (W. et al., 2021). Komitmen ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Permendesa, PDTT Nomor 16 Tahun 2018. Dengan melihat peran Desa menjadi sangat penting maka perubahan iklim dan efek gas rumah kaca diharapkan dapat dipahami Desa dengan melakukan upaya yang mengarah pada pengendalian perubahan iklim.

Berdasarkan Peraturan Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup Nasional dalam rangka mendorong masyarakat dan seluruh pihak untuk melaksanakan aksi lokal meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan penerapan Program Kampung Iklim (ProKlim) berdasarkan aksi adaptasi dan mitigasi serta dukungan kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Program Kampung Iklim (ProKlim) mulai diluncurkan pada tahun 2012. Proklm telah dilaksanakan oleh hampir semua pemerintah daerah seluruh Indonesia. Program ini dirancang untuk jangka panjang, dengan tujuan dan sasaran yang ditargetkan hingga tahun 2030. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap daerah di tingkat dusun atau Desa/Kelurahan minimal memiliki satu program unggulan Kampung Iklim. Untuk mencapai tujuan ini, ProKlim dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu pengembangan di tahun 2012, implementasi di tahun 2017, penguatan komitmen di tahun 2020, percepatan implementasi di tahun 2025, serta menuju pencapaian NDC (*Nationally Determined Contribution*) di tahun 2030 (Oktaviana et al., 2021).

Tabel 1. Potensi PROKLIM Wilayah Jawa Bali Nusra

NO	WILAYAH	JUMLAH POTENSI
1.	Nusa Tenggara Timur (NTT)	587
2.	Nusa Tenggara Barat (NTB)	299
3.	Bali	353
4.	Jawa Timur	2.085
5.	Yogyakarta	339
6.	Jawa Tengah	3.710
7.	Jawa Barat	1.836
8.	DKI Jakarta	267
9.	Banten	588

Sumber : (*Mengenal Proklm Lebih Dekat*, n.d.) Diakses 12 Oktober 2024

Berdasarkan data di atas, menunjukkan data potensi Program Kampung Iklim (ProKlim) di berbagai provinsi di Indonesia berdasarkan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) per tanggal 7 Maret 2022.

Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah potensi ProKlim tertinggi dengan 3.710, diikuti oleh Jawa Timur dengan 2.085, dan Jawa Barat sebanyak 1.836. Provinsi lain seperti NTT, NTB, Bali, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten memiliki jumlah potensi yang lebih rendah, dengan NTT mencapai 587 dan DKI Jakarta yang terendah di angka 267. Data ini memberikan gambaran tentang sebaran potensi ProKlim di Indonesia, dengan fokus terbesar di Jawa Tengah.

Kabupaten Banyumas dengan jumlah kecamatan terbanyak yaitu 27 kecamatan dari tahun 2018 hingga 2022, memiliki potensi besar dalam penerapan program Kampung Iklim (Proklm). Banyaknya kecamatan ini berarti semakin banyak wilayah yang dapat terlibat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Setiap kecamatan di Banyumas memiliki potensi unik dalam hal sumber daya alam, karakteristik lingkungan, dan partisipasi masyarakat yang dapat dioptimalkan dalam program Proklm. Dengan jumlah kecamatan yang besar, program ini dapat menciptakan dampak yang lebih luas dan terkoordinasi, memungkinkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, peningkatan ketahanan iklim, dan kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim (*Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023*).

Tabel 2. Lokasi ProKlim di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA PROKLIM
1.	Baturraden	7
2.	Cilongok	5
3.	Karanglewas	2
4.	Kemranjen	8
5.	Kembaran	2
6.	Purwokerto Timur	1
7.	Banyumas	7
8.	Kedungbanteng	2
9.	Purwokerto Barat	2
10.	Purwokerto Utara	4
11.	Lumbir	2
12.	Kebasen	4
13.	Pekuncen	3
14.	Tambak	2
15.	Purwokerto Selatan	2
16.	Sokaraja	3
17.	Somagede	5
18.	Sumpiuh	2

19.	Gumelar	2
20.	Sumbang	4
21.	Patikraja	3
22.	Rawalo	7
Total		79

Sumber : *Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas*

Pada tahun 2023, ProKlim mencatat sebanyak 6.708 lokasi yang terdaftar dalam Sistem Registri Nasional (SRN) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Setiap tahunnya, ProKlim memberikan penghargaan kepada daerah yang menunjukkan komitmen dan aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Penghargaan ini terbagi menjadi empat kategori, yaitu ProKlim Pratama, ProKlim Madya, ProKlim Utama, dan ProKlim Lestari yang disesuaikan dengan tingkat kontribusi dan keberhasilan program. Berikut data lokasi peraih penghargaan ProKlim di Kabupaten Banyumas:

Tabel 3. Lokasi Peraih Penghargaan ProKlim di Kabupaten Banyumas

PENGHARGAAN	LOKASI	JUMLAH
Tropy, Sertifikat, Insentif	Desa Cikidang, Kec. Cilongok	1
Sertifikat	Desa Kejawar Kec. Banyumas	10
	Dusun 1 Desa Pekunden Kec. Banyumas	
	Desa Sudagaran Kec. Banyumas	
	Desa Kebumen Kec. Baturraden	
	Desa Pamijen Kec. Baturraden	
	Desa Kedungbanteng Kec. Kedungbanteng	
	Desa Alasmalang Kec. Kemranjen	
	Desa Besuki Kec. Lumbir	
	Kel. Kober Kec. Purwokerto Barat	
	Kel. Purwanegara Kec. Purwokerto Utara	
	TOTAL	11

Sumber: (Sigit, 2023) *Diakses 12 Januari 2025*

Berdasarkan data penghargaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kabupaten Banyumas, terlihat bahwa Kabupaten Banyumas menunjukkan upaya aktif dalam menggerakkan masyarakat di berbagai wilayah untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Hal ini mencerminkan komitmen daerah untuk mencapai keberlanjutan lingkungan melalui ProKlim, yang diharapkan dapat mengurangi dampak perubahan iklim secara menyeluruh di tingkat Desa. Desa Cikidang Kecamatan Cilongok merupakan salah satu Desa di

Kabupaten Banyumas yang mendapatkan Penghargaan terbanyak. Sebagaimana dibuktikan dari Pemerintahan Desa Cikidang yang didapatkan melalui surat undangan penerima penghargaan dari Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Desa Cikidang meraih penghargaan ProKlim Utama.

Tabel 4. Daftar penghargaan PROKLIM di Jawa Tengah Pada Tahun 2023

JENIS PENGHARGAAN	LOKASI	JUMLAH
Trophy Proklam Lestari	Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang	4
	Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang	
	Dukuh Bodeyan, Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	
	Dusun Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo	
Trophy Proklam Utama	Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas	7
	Dusun Ngampel, Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar	
	Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang	
	Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta	
	Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang	
	Desa Demakan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo	
	Dusun Gondang, Desa Gondang Kecamatan, Watumalang, Kabupaten Wonosobo	
TOTAL		11

Sumber : Pemerintah Desa Cikidang (Surat Undangan Penghargaan dari KLHK)

Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, merupakan salah satu Desa yang telah mengimplementasikan Proklam sejak tahun 2015. Desa Cikidang mendaftarkan diri sebagai desa Program Kampung Iklim (ProKlim) dilatarbelakangi oleh kesadaran pemerintah desa dan masyarakat terhadap pentingnya upaya penanganan perubahan iklim yang mulai dirasakan dampaknya, khususnya pada sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama warga. Perubahan pola cuaca, ancaman kekeringan, serta potensi kerusakan lingkungan mendorong desa untuk mencari solusi yang berkelanjutan melalui program berbasis

lingkungan. Selain itu, adanya dorongan kebijakan dari pemerintah serta peluang cunuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat menjadi faktor pendukung keputusan tersebut. Desa Cikidang juga melihat ProKlim sebagai sarana untuk mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat partisipasi masyarakat, serta memperoleh pembinaan dan pengakuan dari pemerintah. Dengan demikian, pendaftaran sebagai desa ProKlim merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan tanggap terhadap perubahan iklim. Implementasi Proklm di Desa Cikidang telah menunjukkan berbagai hasil positif. Dalam program Kampung iklim ini terdapat tiga aspek yang menjadi indikator penting yaitu adaptasi, mitigasi dan kelembagaan atau dukungan keberlanjutan (Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, 2017). Berikut adalah program yang terdapat di PROKLIM Desa Cikidang :

Tabel 1. Program ProKlim Desa Cikidang

Aspek	Program/Kegiatan	Keterangan
Adaptasi	Pengelolaan Air	Pembuatan penampungan air hujan, sumur resapan, dan lubang biopori untuk mengantisipasi kekeringan dan banjir.
	Ketahanan pangan	Penerapan pertanian terpadu melalui metode Mina Tani (ikan & padi) dan Wana Tani (hutan & tani) untuk optimalisasi lahan.
	Pola Hidup Sehat (PHBS)	Penerapan gerakan 3M (Menguras, Menutup, Menimbun) dan penggunaan fasilitas kesehatan (Posyandu/Puskesmas) untuk mencegah penyakit akibat perubahan iklim.
Mitigasi	Daur Ulang Sampah	Mengolah sampah menjadi barang bernilai ekonomis seperti tas dan tempat tisu agar tidak menjadi sarang penyakit.
	Penghijauan (Vegetasi)	Melakukan penanaman pohon secara rutin dan melarang penebangan pohon penyerap air serta pohon produktif.
	Pertanian Ramah Lingkungan	Penggunaan pupuk organik untuk menjaga unsur hara tanah dan kestabilan ekosistem pertanian.
	Pengelolaan Limbah Tanpa Bakar	Larangan membakar sampah atau sisa hasil panen (jerami) di lahan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga kualitas tanah.
	Kelembagaan Struktur Organisasi	Pembentukan Tim ProKlim Desa Cikidang sebagai penggerak aksi lingkungan di tingkat lokal.

Kemitraan & Pembinaan	Kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyumas dan perguruan tinggi (mahasiswa KKN) dalam pendampingan program.
Dukungan Kebijakan	Komitmen pemerintah desa dan tokoh masyarakat (seperti PKK) untuk mensukseskan gerakan nasional pengendalian perubahan iklim.

Sumber : (Cikidang TV, n.d.) Diakses 13 Januari 2025

Keberhasilan Proklim di Desa Cikidang menunjukkan bahwa program ini dapat di replikasi di desa-desa lain di Indonesia. Pemilihan Desa Cikidang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Pertama, desa ini telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) dan bahkan berhasil meraih penghargaan kategori ProKlim Utama, yang menunjukkan adanya capaian nyata dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kedua, Desa Cikidang memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan konservasi air, sehingga memenuhi kriteria sebagai desa yang aktif dan responsif terhadap program berbasis masyarakat. Ketiga, keberagaman program yang dijalankan, baik pada aspek adaptasi, mitigasi, maupun kelembagaan, menjadikan desa ini representatif untuk dikaji secara mendalam. Keempat, adanya dukungan dari pemerintah desa serta sinergi dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup turut memperkuat implementasi program. Selain itu, aksesibilitas lokasi yang cukup mudah serta ketersediaan data dan informan yang relevan juga menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan Desa Cikidang sebagai lokasi penelitian. Replikasi Proklim dapat membantu Indonesia untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Proklim dan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam replikasi Proklim di desa-desa lain.

Berdasarkan pemaparan dari hasil observasi diatas, Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan salah satu alternatif solusi untuk pemberdayaan

masyarakat untuk menangani perubahan iklim. Maka peneliti mempunyai ide untuk dijadikan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) DI DESA CIKIDANG, KECAMATAN CILONGOK, KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023”**. Penelitian ini akan fokus pada analisis implementasi Proklim di Desa Cikidang,

Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Proklam di Desa Cikidang dan mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan untuk replikasi Proklam di desa-desa lain. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi perubahan iklim di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, serta di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan dengan tujuan penelitian. Desa Cikidang dipilih karena telah ditetapkan sebagai desa ProKlim oleh pemerintah daerah, yang menegaskan adanya komitmen dalam menghadapi perubahan iklim. Selain itu, desa ini juga memperoleh penghargaan dalam Program Kampung Iklim (ProKlim), menunjukkan capaian nyata dalam pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tingginya partisipasi masyarakat Desa Cikidang dalam program ProKlim memperlihatkan kesadaran kolektif serta keterlibatan aktif masyarakat. Keberagaman strategi dalam implementasi program juga menjadi daya tarik penelitian ini. Adapun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dipilih karena mampu memberikan data dan wawasan pendukung terkait kebijakan dan pelaksanaan ProKlim. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif berangkat dari pola pikir induktif yang berlandaskan pada pengamatan objektif dan partisipatif terhadap fenomena sosial, baik yang terjadi di masa lalu, masa kini, maupun yang berpotensi di masa depan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial yang diteliti, dalam hal ini terkait implementasi kebijakan ProKlim di Desa

Cikidang. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Cikidang berdasarkan model Van Horn dan Van